

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2025**

Nomor DPA : DPPA/A.2/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Program : PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Sub Kegiatan : 8.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Alokasi Anggaran : Rp. 1,139,222,000.00

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINNEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN TAHUN 2025

I. Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang berbentuk republik menggunakan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara serta filsafah bangsa dan negara yang sangat fundamental. Pancasila sebagai dasar negara dapat ditinjau dari berbagai aspek, yakni aspek histori, kultural, yuridis dan filosofis. Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk dari berbagai Ras/Etnis, Suku, Agama, Bahasa dan Budaya, menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan keragamannya.

Sebagai negara republik yang kaya akan keragaman, Indonesia rentan terjadinya konflik perpecahan. Perpecahan antar warga negara yang kini sering terjadi, mengakibatkan bangsa Indonesia menjadi negara yang lemah, tidak mandiri dan diperalat oleh bangsa lain. Kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, menunjukkan kondisi yang jauh dari nilai-nilai Pancasila. Maraknya kasus intoleran, radikalisme, fundamentalisme dan terorisme menunjukkan betapa jauhnya dari nilai-nilai Pancasila.

Mendorong peningkatan dalam menjaga dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa serta tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan adanya komitmen seluruh bangsa untuk selalu meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, dengan berpegang teguh pada Pancasila sebagai dasar negara.

Penyelenggaraan kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk upaya antisipasi paham lain masuk ke Indonesia. Harapannya untuk menjaga keberlanjutan dan relevansinya nilai-nilai luhur Pancasila dalam menjawab tantangan dan perubahan zaman. Sebagai bentuk menjaga keamanan dan ketahanan NKRI.

2. Dasar Hukum

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat;

3. Maksud, Tujuan dan Hasil

1. Maksud

Maksud dilaksanakannya Kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah menghidupkan kembali pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai sikap menjaga dan memelihara kerukunan persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Tujuan

Adapun tujuan dan dilaksanakannya Kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai wadah informasi, komunikasi, dan konsultasi masyarakat Indonesia yang berwawasan Pancasila, memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme.

3. Hasil

Adapun hasil yang diharapkan dari dilaksanakannya Kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila, adalah :

- a. Terciptanya kondusifitas dari kondisi kemajemukan masyarakat dalam wadah NKRI
- b. Terciptanya pendekatan edukatif untuk menggugah kesadaran masyarakat dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

- c. Meningkatnya masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersamaan dalam kemasyarakatan berbangsa demi terciptanya kerukunan di Sumatera Barat.

B. PELAKSANAAN

1. Ruang Lingkup dan Materi

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila ini adalah :

1. Dalam rangka konsolidasi dan sinkronisasi kegiatan serta tugas penyelenggara negara dan peran masyarakat dalam upaya menumbuhkan kembali pemahaman nilai-nilai Pancasila
2. Pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila, yang diberikan kepada masyarakat yang ada di daerah, dengan materi sebagai berikut :
 - a. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila.
 - b. Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Mencegah Perpecahan Dan Paham Lain Masuk Di Tengah Masyarakat
 - c. Merajut Kebersamaan dalam Kebhinekaan.
 - d. Membangun Karakter Bangsa Sesuai Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara
 - e. Ideologi Pancasila Sebagai Alat Pemersatu Bangsa.

2. METODOLOGI

1. Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila melaksanakan pertemuan dengan menggunakan metode, sebagai berikut;
 1. Penyampaian materi dari Narasumber yang dipandu oleh moderator.
 2. Pendalaman materi dilakukan dengan permainan sesi Tanya jawab.

3. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Peserta

Peserta Kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila ini direncanakan berjumlah 60 (enam puluh) orang yang terdiri dari masyarakat di Kabupaten/Kota Prov. Sumbar.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila ini dilaksanakan 1 (satu) hari di Kabupaten/Kota.

3. Narasumber

- a. Pakar/Praktisi
- b. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
- c. Akademisi

4. Panitia Pelaksana

Panitia yang akan melaksanakan Kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila ini merupakan unsur dari Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, dengan keanggotaannya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab
- b. Ketua Pelaksana
- c. Sekretaris
- d. Anggota

C. KOORDINASI DAN MONITORING

Dalam rangka memperoleh hasil sesuai yang diharapkan, maka diperlukan persiapan-persiapan dengan melakukan konsultasi dan koordinasi kepada pejabat yang berwenang di Kementrian Dalam Negeri Disamping itu, juga akan dilaksanakan koordinasi dengan Kepala Badan/Kantor Kesbangpol setempat dalam rangka rencana dan fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Bimtek Pembauran Kebangsaan dimaksud.

D. PEMBIAYAAN

1. Sumber Dana

Segala biaya yang ditimbulkan untuk mendukung Kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat pada Kegiatan Bimtek Pembauran Kebangsaan.

2. Pemanfaatan Dana

Kegiatan Bimtek Pembauran Kebangsaan didukung dengan dana sebesar Rp. 25.640.000,- (Duapuluh Lima Juta Enamratus Empatpuluh Ribu Rupiah).

II. Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sangat potensial dalam hal Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) serta memiliki posisi penting sebagai kondisi geostrategis dan geopolitik di wilayah regional maupun internasional, maka wajar saja bangsa Indonesia selalu menjadi sorotan/perhatian serta sangat dibutuhkan oleh dunia Internasional.

Mencermati kondisi dimaksud, tentu dunia internasional memiliki kepentingan yang erat dengan Indonesia, baik kepentingan sosial ekonomi, sosial politik, maupun pertahanan dan keamanan. Untuk itu kita Bangsa Indonesia haruslah waspada terhadap berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh berbagai kepentingan tersebut.

Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana Bangsa Indonesia dengan jumlah penduduknya sekitar 275,77 juta jiwa mampu membangun suatu kondisi karakter bangsa yang kuat dan bersatu, sehingga apapun gangguan dan ancaman baik dari luar maupun dari dalam negara sendiri dapat dihadapi dengan prinsip persatuan dan kesatuan bangsa, dan bukan sebaliknya anak bangsa sendiri yang selalu saling merongrong, saling melemahkan dan bahkan mengkhianati bangsanya sendiri dengan perilaku yang menyimpang seperti tidak lagi saling menghargai, rendahnya kepedulian, mudah terpengaruh aliran radikal, maraknya peredaran dan pemakaian Narkoba yang dapat merusak mental generasi muda bangsa, mudahnya terjadi konflik (horizontal/vertikal), dan sebagainya.

Menyikapi dilematis tersebut, yang didorong pula dengan pengaruh globalisasi dan reformasi, maka hal terpenting perlu dilakukan saat ini adalah bagaimana seluruh komponen bangsa bersama-sama memperbaiki kembali degradasi perilaku/moral anak bangsa dimaksud, dengan secara terus menerus ditanamkan kembali nilai-nilai wawasan kebangsaan terutama semangat bela negara.

Berkenaan dengan itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat perlu melaksanakan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara sebagai salah satu instrumen yang dianggap paling konseptual dan strategis sebagai upaya reaktualisasi dari nilai-nilai wawasan kebangsaan guna untuk meningkatkan ketahanan bangsa.

2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

3. Maksud, Tujuan dan Hasil

1. Maksud.

Maksud dilaksanakan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara ini adalah

- a. Untuk menyatukan visi dan misi serta kerangka berfikir, tentang pentingnya Penguatan Wawasan Bela Negara bagi Siswa SLTA dan Generasi Muda, dalam upaya memperkokoh ketahanan bangsa guna mendukung keutuhan NKRI.
- b. Mendorong tumbuhnya Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Bela Negara bagi Siswa SLTA dan Generasi Muda, dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Tujuan

Adapun tujuan diselenggarakannya Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara ini adalah dalam rangka menyamakan persepsi tentang pentingnya membangun kesadaran bela negara melalui pembentukan kualitas pribadi, yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Hasil

Adapun hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara ini adalah :

- a. Meningkat dan menguatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan bagi seluruh lapisan sosial masyarakat yang dapat menampilkan kemampuan awal bela negara.
- b. Bertumbuh kembangnya semangat kebersamaan bagi setiap warga negara sebagai tanggung jawab sebagai bagian dari komponen bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang didorong oleh kesadaran dan semangat berbangsa dan bela negara.
- c. Tersedianya sumber daya manusia sebagai potensi pendukung upaya pembelaan negara/bela negara.

B. PELAKSANAAN

1. Ruang Lingkup dan Materi

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara akan merasangi rasa tentang pentingnya membangun kesadaran bela negara melalui pembentukan kualitas pribadi, yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara, materi yang akan diberikan, antara lain adalah:

1. Semangat Bela Negara Dalam Mendukung Pembangunan Daerah.
2. Kesadaran Bela Negara Dalam Mendukung Ketahanan Bangsa.
3. Wawasan Kebangsaan.
4. Membangun Karakter Bangsa Yang Sadar Bela Negara Melalui Nilai-Nilai Sejarah Perjuangan Bangsa.

2. Metodologi

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara dilakukan dengan menggunakan metode, sebagai berikut :

1. Penyampaian materi dari Narasumber yang dipandu oleh moderator
2. Pendalaman materi dilakukan dengan diskusi/tanya jawab.

3. Pelaksanaan Kegiatan

1). Peserta

Peserta Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara akan diikuti terdiri dari Generasi Muda di Kabupaten/Kota.

2). Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara dilaksanakan selama 1 (satu) hari di Kabupaten/Kota.

3). Narasumber

Adapun Narasumber yang akan menyampaikan materi untuk Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela ini adalah sebagai berikut :

- b. Bupati/Walikota.
- c. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
- d. Kepala Badan/Kantor/Bidang Kesbangpol Kabupaten/ Kota
- e. Pakar/Akademisi

4). Panitia Pelaksana

Panitia yang akan melaksanakan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara merupakan unsur dari Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dan Badan/Kantor/Bidang Kesbangpol di Kabupaten/Kota, dengan keanggotaan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab
- b. Ketua Pelaksana
- c. Sekretaris
- d. Anggota
- e. Sekretariat

5). Koordinasi dan Monitoring

Dalam rangka memperoleh hasil sesuai yang diharapkan, maka diperlukan persiapan-persiapan dengan melakukan konsultasi dan koordinasi tentang kebijakan-kebijakan di bidang Bela Negara kepada pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan.

Disamping itu, dalam rangka memperoleh bahan dan data tentang Kader Bela Negara di Daerah, maka akan dilaksanakan koordinasi dan monitoring ke Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, dengan harapan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

C. PEMBIAYAAN

1. Sumber Dana

Segala biaya yang ditimbulkan untuk mendukung Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, pada Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara.

2. Pemanfaatan Dana

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara ini didukung dengan dana sebesar Rp. 1.182.960.000,- (Satu Miliar Seratus Delapanpuluh Dua Juta Sembilanratus Enampuluh Ribu Rupiah).

III. Penguatan Pembauran Kebangsaan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang luas dengan populasi penduduknya yang besar memiliki keunikan dan kemajemukan dari berbagai Ras/Etnis, Suku, Agama, Bahasa dan Budaya, dimana kemajemukan tersebut merupakan potensi dan modal dasar dalam membangun karakter bangsa.

Sebaliknya masyarakat yang multi etnik tersebut juga bisa menjadi ancaman terjadinya konflik horizontal dan bahkan akan dapat mengarah pada disintegrasi bangsa, apalagi sebagian dari komponen bangsa belum mampu untuk memelihara dan saling menjaganya melalui semangat pembauran kebangsaan dengan saling menghargai dan bertoleransi untuk tetap terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa serta tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan adanya komitmen seluruh bangsa untuk selalu meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, dengan melestarikan nilai sosial budaya, mengembangkan kehidupan demokrasi, dan melindungi masyarakat, serta meningkatkan kerukunan nasional melalui pembauran kebangsaan secara berkelanjutan.

Untuk mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan guna memperkokoh integritas nasional serta menegakkan NKRI, perlu dilaksanakan Kegiatan Bimtek Pembauran Kebangsaan di Daerah.

Penyelenggaraan kegiatan Bimtek Pembauran Kebangsaan ini adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan agar semua elemen masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis dapat saling berintegrasi, baik di bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian tanpa harus menghilangkan identitas, ras, suku, dan etnis masing-masing dalam NKRI.

2. Dasar Hukum

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat;

3. Maksud, Tujuan dan Hasil

1. Maksud

Maksud dilaksanakannya Kegiatan Penguatan Pembauran Kebangsaan adalah dalam rangka menjaga dan memelihara kerukunan serta melestarikan nilai sosial budaya dan mengembangkan kehidupan demokrasi dalam upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Tujuan

Adapun tujuan dan dilaksanakannya Kegiatan Penguatan Pembauran Kebangsaan adalah sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat dari berbagai etnis di Sumatera Barat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

3. Hasil

Adapun hasil yang diharapkan dari dilaksanakannya Kegiatan Penguatan Pembauran Kebangsaan, adalah :

- a. Terciptanya kesamaan persepsi dalam pembentukan FPK untuk menciptakan kerukunan antar etnis dan ras yang ada bersama Instansi terkait di Daerah.
- b. Meningkatnya pemahaman Etnis/Paguyuban, yang ada tentang pentingnya memasyarakatkan pembauran kebangsaan demi terciptanya kerukunan di Sumatera Barat.

B. PELAKSANAAN

1. Ruang Lingkup dan Materi

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Penguatan Pembauran Kebangsaan ini adalah :

1. Dalam rangka konsolidasi dan sinkronisasi kegiatan serta meningkatkan integritas koordinasi dan komunikasi Tim Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumatera Barat, yang telah dibentuk dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 220-333-2020 tanggal 5 Mei 2020.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Pembauran Kebangsaan, yang diberikan kepada etnis/paguyuban, yang ada di daerah, dengan materi sebagai berikut :
 - a. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan Program Pembauran Kebangsaan di Daerah.
 - b. Pembauran Kebangsaan Sebagai Upaya Mencegah Konflik Sosial di Tengah Masyarakat
 - c. Merajut Kebersamaan dalam Kebhinekaan

2. METODOLOGI

1. Forum Pembauran Kebangsaan melaksanakan pertemuan secara rutin dengan Dewan Pembina berkaitan dengan penyusunan program kerja FPK, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dan melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja. Pertemuan dimaksud direncanakan dilaksanakan untuk 1 (satu) kali pertemuan.
2. Kegiatan Penguatan Pembauran Kebangsaan dilaksanakan dengan menggunakan metode sebagai berikut :
 - a. Penyampaian materi oleh Narasumber yang dipandu oleh Moderator
 - b. Pendalaman materi dilakukan dengan diskusi/tanya jawab.

3. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Peserta
Peserta Kegiatan Penguatan Pembauran Kebangsaan ini direncanakan terdiri dari generasi muda etnis/paguyuban Prov. Sumbar.
2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Kegiatan Penguatan Pembauran Kebangsaan ini dilaksanakan 1 (satu) hari di Kabupaten/Kota.
3. Narasumber
 - a. Pakar/Praktisi
 - b. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Prov. Sumbar
 - c. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
 - d. Akademisi
4. Panitia Pelaksana
Panitia yang akan melaksanakan Kegiatan Penguatan Pembauran Kebangsaan ini merupakan unsur dari Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, dengan keanggotaannya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

C. KOORDINASI DAN MONITORING

Dalam rangka memperoleh hasil sesuai yang diharapkan, maka diperlukan persiapan-persiapan dengan melakukan konsultasi dan koordinasi kepada pejabat yang berwenang di Kementerian Dalam Negeri Disamping itu, juga akan dilaksanakan koordinasi dengan Kepala Badan/Kantor Kesbangpol setempat dalam rangka rencana dan fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Penguatan Pembauran Kebangsaan dimaksud.

D. PEMBIAYAAN

1. Sumber Dana

Segala biaya yang ditimbulkan untuk mendukung Kegiatan Penguatan Pembauran Kebangsaan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat pada Kegiatan Penguatan Pembauran Kebangsaan.

2. Pemanfaatan Dana

Kegiatan Penguatan Pembauran Kebangsaan didukung dengan dana sebesar Rp. 25.832.000,- (Duapuluh Lima Juta Delapanratus Tigapuluh Dua Ribu Rupiah).

E. PENUTUP

1. Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan Penguatan Pembauran Kebangsaan dan Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara
2. Setelah pelaksanaan Penguatan Pembauran Kebangsaan dan Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara, akan dibuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Pengguna Anggaran



Adi Dharma, S.Sos
NIP. 19681016 198903 1 003

Padang, Januari 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



Donny Rahma Saputra, ST, M.Si
NIP. 19780528 200501 1 007